

RENCANA KERJA KECAMATAN

(RENJA)

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN KIARAPEDES

Jl. Raya Kiarapedes KM 28 Kiarapedes-Purwakarta 41175

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kiarapedes dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2026 sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan, maka Pemerintah Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Kabupaten Purwakarta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Rencana Kecamatan Kiarapedes dimaksud meliputi ~~Rencana~~ Rencana strategis (RENSTRA) untuk pembangunan 3 (Tiga) tahun dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Kecamatan Kiarapedes untuk pembangunan tahunan.

Penyusunan Renja Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 mempedomani dokumen ~~Rencana~~ Renstra Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2026, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026. Hal ini dikarenakan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dan periode RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 berakhir pada tahun 2023, sehingga penyusunan dokumen Renja Tahun 2025 mempedomani dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 -2026 tersebut, sebagai transisi masa kepemimpinan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2025.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kiarapedes Tahun 2025-2026 digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Rencana Kerja tahunan (RENJA) selama 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2025 – 2026.

Rencana Strategis Kecamatan Kiarapedes Tahun 2025-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, yakni Tahap Keempat RPJPD. Sedangkan Renja merupakan penjabaran pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahunan yang berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kiarapedes Tahun 2025 mengakomodir semua kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan pada masing-masing Perangkat Kecamatan, yang disesuaikan dengan kemampuan riil Anggaran keuangan setiap Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pemerintahan Kecamatan Kiarapedes dan regulasi kebijakan Pimpinan yang harus dilaksanakan.

Selain itu Renja juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Renja Kecamatan Kiarapedes Tahun 2025 ini difokuskan pada Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2026 yaitu Visi : " **PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**" , dengan Misi : "Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat " , Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan, Meningkatkan Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan, Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat, Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Renja Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu :

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) ;
3. Verifikasi Renstra;
4. Penyempurnaan Penyusunan dokumen Renstra
5. Penyusunan Rancangan Renja;
6. Verifikasi Renja 2025;
7. Penyempurnaan Penyusunan Renja ; dan
8. Penetapan Rencana Kerja (Renja).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

33. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);

34. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

35. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);

36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 2026;

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;

40. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor PR.02.01/4306/Bappelitbangda/2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024;

Perbup No. 36 Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Kecamatan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja);
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan laporan capaian kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kiarapedes , dan penyusunan laporan lainnya;

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

2. BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel ~~T-C.29~~)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel ~~T-C.30~~)
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel ~~T-C.31~~)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel ~~T-C.32~~)

3. BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- ~~3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah~~
- 3.3 Program dan Kegiatan (Tabel ~~T-C.33~~)

4. BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik

5. BAB V

PENUTUP

(4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;

- a. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain meliputi :
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- b. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- c. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- e. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- f. pelaksanaan pelayanan publik;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Desa;
- h. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

D. PERINCIAN TUGAS

1. Camat

- a. memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas Kecamatan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :
 - 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

- f. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
- 1) sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi vertikal terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati :
- g. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di kecamatan;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi;
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektifitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan kepada Bupati; dan
 - 4) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa;
- i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pemerintahan desa dan/atau Desa sesuai azas kewajiban, dan batas wewenang sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, sesuai wilayah Kecamatan;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Camat;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau peraturan perundang- undangan;

- (2) Selain melaksanakan perincian tugas dan fungsi Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
 - b. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
 - c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
 - e. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai perincian tugas:
- a. menyusun rencana kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
 - c. menyelenggarakan penatausahaan keuangan kecamatan;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi naskah dinas;
 - f. mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana kerja kecamatan;
 - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
 - h. memberikan layanan kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup kecamatan;
 - i. mengkoordinasikan penunjukan pengelola program dan kegiatan lingkup kecamatan;

- j. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada atasan;
- l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi sekretaris;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Sekretaris kepada camat.

l. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

- 1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
 - b. penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup kecamatan;
 - d. menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara di lingkup Kecamatan;
 - e. membina, mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan;

- h. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- i. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lain yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- j. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang diblayai oleh APBD di lingkup kecamatan;
- k. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
- l. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
- m. melakukan verifikasi harian atas pengeluaran keuangan kecamatan;
- n. menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
- o. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup kecamatan;
- p. menyusun laporan keuangan kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun;
- q. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;
- r. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- s. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
- t. mengatur administrasi perjalanan dinas;
- u. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Kecamatan;
- v. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan, keuangan, dan pelaporan kepada atasan;
- w. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan kepada Sekretaris.

4. Subbagian Kepegawaian dan Umum

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan

dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
- c. pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian tugas :

- a. rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memberikan layanan di bidang kepegawaian dan umum kepada unit organisasi lingkup kecamatan;
- c. mengelola administrasi naskah dinas kecamatan;
- d. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan kecamatan;
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan, memberikan layanan penilaian angka kredit (PAK) jabatan fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian, pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);

- f. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup kecamatan;
- g. menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan dan perjalanan dinas kecamatan;
- h. menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan protokoler kecamatan;
- i. melakukan pengadaan, pendistribusian, pencatatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor;
- k. mengelola administrasi gaji pegawai;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian dan umum kepada atasan;
- m. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada Sekretaris.

5 Seksi Tata Pemerintahan

- (1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - b. pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Desa;
 - c. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau Desa;

- d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, Desa dan/atau desa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai perincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau Desa;
- c. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau Desa;
- d. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Desa;
- e. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan;
- f. menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
- h. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan/atau Desa;
- j. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Desa kepada camat;
- k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;

- b. melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi dalam menjaga situasi ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta mewujudkan upaya-upaya perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa, serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan produk hukum daerah, dan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kecamatan;
- f. melakukan usaha-usaha preventif dan represif, serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, agama, ras, dan antar golongan;
- g. merumuskan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial, dan konflik etnis;
- h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan untuk membantu mewujudkan ketahanan nasional dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Desa;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- l. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat.

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
- e. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau Desa;
- f. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai perincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di kecamatan ataupun di desa dan/atau Desa;
- c. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi untuk pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di kecamatan;

- d. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga /organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;
- g. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan pemerintahan desa dan/atau Desa;
- h. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- i. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana wilayah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan kepada Camat.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;

- c. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau Desa;
 - d. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - e. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai perhatian tugas :
- a. menyusun rencana kerja kerja Seksi Kesejahteraan Sosial, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi pemberian bantuan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kebudayaan, pembinaan generasi muda, dan olah raga;
 - c. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
 - d. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau Desa;
 - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana;
 - f. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - g. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak pihak lain guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan upaya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkenaan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - i. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan pemerintahan desa dan/atau Desa;
 - j. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial;

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial kepada Camat.

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
 - f. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai rincian tugas:
 - g. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun rencana kerja kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - i. mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - j. melakukan pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berbasis swadaya masyarakat;
 - k. memberikan layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau Desa;
 - l. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - m. menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pihak-pihak lain guna pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat,

- o. yang berkenaan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- p. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan/atau Desa;
- q. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat.

2.3 Isu Strategis

Isu Strategis dapat diukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pada Kecamatan Kiarapedes diidentifikasi ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan dasar isu strategis, yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 antara lain:

1. Unsur Perencanaan

- 1) Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan PD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
- 2) belum optimalnya pelibatan stakeholder nonpemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan;
- 3) Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal;
- 4) Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- 5) Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
- 7) Penggunaan aplikasi SIPD perencanaan masih belum optimal dari segi fitur maupun SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah;

2. . Unsur Keuangan

- 1) . Penggunaan aplikasi SIPD keuangan masih belum optimal dari segi fitur maupun SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah;

- 2) Masih belum optimalnya pengelolaan administrasi Asset Daerah;
- 3) Belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, terutama saat terjadi pandemi covid-19 terjadi penurunan pendapatan daerah,

3. Unsur Kepegawaian

- 1) Masih rendahnya ASN struktural yang mengikuti kegiatan assessment;
- 2) Kurangnya alokasi formasi untuk pemenuhan kebutuhan pegawai;

4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Masih rendahnya peningkatan SDM ASN melalui pendidikan dan pelatihan;

5. Unsur Kewilayahan

- 1) Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan di tingkat desa/Desa;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD {Tabel T-C.31}

Dalam Renja Tahun 2025 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C 31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, sebagaigamana tersaji dalam Tabel T-C.31 dibawah ini :

Tabel 2.3 - (T.C-31)

TABEL T.C-31
PK-PD

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2025 KEC. KIARAPEDES KAB. PURWAKARTA

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEC. KIARAPEDES				3.728.725.604					3.728.725.604	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Purwakarta Kec. Kiaraipedes,		100%	3.533.729.604,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Purwakarta Kec. Kiaraipedes,	Menjaga kinerja pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif	100%	3.533.729.604,	
	1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Kiaraipedes,		100%	30.000.000,	2. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta Kec. Kiaraipedes,	Menjaga kinerja pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif	100%	30.000.000,	

3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,		100 %	2.766.029.604,-	4.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	2.766.029.604,-	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,		6 Laporan	204.367.770-	6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	204.367.770-	
6.	Pengadaan Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	25 Laporan	40.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	40.000.000		
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	11 Unit	323.328.230,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	Kab.Purwakarta Kec.Klarapedes,	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	100 %	323.328.230,-		

	S. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penurjang Urusan Pemerintah daerah		Meningkatnya Efisiensi Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif		170.000.000		Kab Purwacarta Kec. Klarapides,		100 %	170.000.000	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Purwakarta Kec. Klarapides,	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	100.000.000	Program 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kab Purwacarta Kec. Klarapides,	Indeks Kepuasan Masyarakat		100.000.000	
	1. Kegiatan 1: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Purwakarta Kec. Klarapides,	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	100 %	100.000.000	2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab Purwacarta Kec. Klarapides,	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	100 %	100.000.000	
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Purwakarta Kec. Klarapides,	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	35.000.000,-	PROGRAM/ Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab Purwacarta Kec. Klarapides, Sawahkulon	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	35.000.000,-	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan kepala daerah	Kab. Purwakarta Kec. Klarapides,	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	35.000.000,-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai penugasan kepala daerah	Kab Purwacarta Kec. Klarapides,		100 %	35.000.000,-	

4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapeles,	Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	100 %	20.000.000,-		Kab.Purwakarta Kec.Kiarapides,		100 %	20.000.000,-	
	1.Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapeles,	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	20.000.000,-	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapides,		100 %	20.000.000,-	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapeles,	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	100 %	35.000.000,-					35.000.000,-	
	1.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kecamatan Dan kelurahan	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapeles,	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan	40 keluarga	35.000.000,-	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kecamatan Dan kelurahan	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapides,	keluarga	40 Kelurga	35.000.000,-	
6.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapeles,	Tingkat penyelesaian konflik sosial	100 %	5.000.000,-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMLM	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapides,	Tingkat penyelesaian konflik sosial	100 %	5.000.000,-	
	1 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapeles,	Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	5.000.000,-	Kordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab.Purwakarta Kec.Kiarapides,	Tingkat penyelesaian konflik sosial	100 %	5.000.000,-	

3.5 Penelaahan

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Purwakarta. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati (WRB). Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta yang mana penjarangan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Kiarapedes berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang masuk kedalam RKPD dan Renja Kecamatan Kiarapedes adalah usulan untuk Program Percepatan Infrastruktur Desa. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TABEL (T.C.32) 2

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	USULAN PERMASALAHAN	URAIAN PERMASALAHAN	KOEFISIEN VOLUME	ALAMAT LOKASI	PAGU	PERANGKAT DAERAH YANG DITUJU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. KIARAPEDES									
1	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Pariwisata	Pembinaan Keolahragaan	Belum adanya sarana dan prasarana olahraga yang berintegritas dengan tempat Pariwisata dan akan dibangunnya lapangan sepak bola untuk memajukan/ mendongkrak aset yang berada di desa Kiarapedes	1 Kegiatan	Kp. Pareang/ Pasir Haniwung Desa Kiarapedes	Rp. 100.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan

2	Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan TPT	Terjadinya abrasi tanah ke jalan raya, longsor tanah warga, aliran air dari saluran masuk ke jalan raya yang menimbulkan resiko kecelakaan pada pengguna jalan	1 Kegiatan	Kp. Panembong RT/RW : 13/04 Dusun III Desa Klarapedes	Rp. 150.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jembatan jalan Kabupaten	sudah kurang layak dan sempitnya jembatan penyebrangan/jalan sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan	1 Kegiatan	Kp. Babakan Klara RT/RW : 10/03	Rp. 720.255,89	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Peningkatan produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pertanian	Penyediaan Drainase	tersumbatnya/ kurang lancarnya air di saluran untuk mengairi area pertanian/persawahan yang berada di wilayah tersebut, dan terjadinya longsor	1 Kegiatan	area Pertanian/ Jl. Cirampog, dusun I - Jl. Citanggul Kp. Pareang dusun III Desa Klarapedes	Rp. 56.000,000	Dinas Pangan dan Pertanian

5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan bertanggung	PVIED	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	kurangnya keahlian/memahami pembukuan bulandes dalam menyusun neraca keuangan	12 Kegiatan	Kiarapedes	Rp. 36.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. CIRACAS									
1	Prioritas Pembangunan 7 Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan	terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan daya saing pertanian, perikanan dan peternakan	Pertanian	Bantuan Pengadaan Benih Paki, Tanaman, Holtikultura, Pupuk	belum mempunyai benih unggulan	1 Paket	Desa Ciracas	Rp. 120.000.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Prioritas Pembangunan 9 Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Kabupaten	Jalan aspal rusak berat	P = 1000 ML = 3 M T = 0,05 M	Desa Ciracas	Rp. 1.150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

3	Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka berkembangnya wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan TPT	Terjadinya abrasi tanah ke jalan raya, longsor tanah di sisi kanan dan kiri jalan raya yang menimbulkan bahaya keselamatan pada pengguna jalan	Rak. M, 101 TA	Kp. 80209, KORBANG 11/12/2019	Ya	100/100/100	100% Sangat Baik 1 100% Baik 100% Sangat Baik
4	Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka berkembangnya wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Parkir jalan raya	terjadinya banjir akibat dan sampah	1 Unit	Kp. 80209, KORBANG 11/12/2019	Ya	100/100/100	100% Sangat Baik 1 100% Baik 100% Sangat Baik
5	Peningkatan SDY dan Pemajatan Kelayakan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berkelayakan dan berkarya	PTB	Pembinaan dan pemberdayaan Bina Desa dan Lembaga Masyarakat adat Desa	terjadinya masalah/pemadatan pemukiman yang menimbulkan masalah kesehatan	11 (satu)	KORBANG 11/12/2019	Ya	100/100/100	100% Sangat Baik 1 100% Baik 100% Sangat Baik
3. PARAKAN GARUKER										

1	Peningkatan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan	Belum tersentuhnya Bidang Olah Raga	1 Paket	Dusun 1,2,3	Rp.	50.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi	Terciptanya iklim Investasi yang Kondusif	Pariwisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Belum tersentuhnya Bidang Pariwisata	1 Paket	Dusun 1	Rp.	500.000.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pertalkan Drainase Jalan Kabupaten	Sering Tersumbatnya Saluran drainase	3 Km	Dusun 1,2	Rp.	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4	Peningkatan Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka Penataan Pengembangan Wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program drainase Jalan Lingkungan	Sering Tersumbatnya Saluran drainase	1 Km	Dusun 1,2	Rp. 200.000.000	Dinas Perekonomian dan Perindustrian
5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan berprestasi	PUEO	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	Kurangnya keahlian/keahlian dalam membina pembudayaan BUMDes dalam mengurus neraca keuangan	12 Kegiatan	Klarifikasi	Rp. 10.000.000	Dinas Perekonomian dan Perindustrian
4. PUSAKAMULYA									
1	Peningkatan dan pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Peningkatan Infrastruktur	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan Desa Dusun 02 Legokbaring	Jalan sudah rusak	180 m	Kp. Legokbaring RT 06 RW 03 Desa Pusakamulya	Rp. 28.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2	Peningkatan dan pemerataan infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Peningkatan Infrastruktur	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan Produksi Tani Dusun 01 Cikubang	Pengaspalan Jalar	613 m	Kp. Cikubang RT 02 RW 01 Ds. Pusakamulya	Rp.	183.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudi daya dan bertanggung	PUED	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	kurangnya keahlian/memahami pembukuan bumdes dalam menyusun neraca keuangan	12 Kegiatan	Kiarapedes	Rp.	36.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. CIBEER										
1	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lingkungan hidup	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA	tidak ada fasilitas untuk membuang sampah sehingga banyak warga yang membuang sampah pada selokan dan mengakibatkan banjir di musim hujan	1 Paket	Dusun I	Rp.	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

2	Pengembangan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan UMKM	para Pelaku UMKM cenderung kurang maju dikarenakan kurang adanya pelatihan dan pembinaan yang serius dari Pemerintah serta lemahnya kekuatan modal	1 Kegiatan	Dusun I, II dan III	Rp. 50.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3	Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan	terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan daya saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	sistem Irigasi / pengaliran tanah sawah kurang, sehingga banyak lahan Pertanian yang kekeringan air	1 Kegiatan	Dusun I, II dan III	Rp. 500.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
4	peningkatan dan pemerataan infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pertbaikan jalan Kabupaten	Jalan Kabupaten sudah banyak yang bolong dan rusak sehingga menghambat dan mengancam keselamatan bagi pengguna jalan	1.300 M	Dusun I dan Dusun II Desa Cibeber	Rp. 1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudi daya dan bertanggung	PUED	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	Ketertarikan/keaktifan/memahami pentingnya pembangunan kumdes dalam menyusun rencana kelurahan	12 kegiatan	Ketercapaian	96	100%	100%
5. SUMBERSARI										
1	Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan	Terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan daya saing pertanian, perikanan dan peternakan	Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Salinya pengembangan hasil produksi pertanian dan peternakan dengan biaya yang terjangkau	3 kegiatan	Terwujud	96	100%	100%
2	Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar di semua Wilayah	Meningkatnya Penanggulangan kemiskinan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pertalikan rumah tidak layak huni	Rumah tidak layak huni dengan rumah layak huni dengan bantuan dana dari pemerintah kabupaten	10 kegiatan	Terwujud	96	100%	100%

2	Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Kabupaten	Jalan sempit sehingga mengancam keselamatan bagi pengguna jalan	1 Kegiatan	Blok Nangka s.d Kantor Kepala Desa Gardu	Rp. 5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas infrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Perhubungan	Penediaan Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten	tidak adanya penerangan ketika di malam hari sehingga rawan kejahatan bagi pengguna jalan	4 titik	Desa Gardu	Rp. 200.000.000	Dinas Perhubungan
4	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan bertakwa	PUED	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	kurangnya keahlian/memahami pembukuan bumdes dalam menyusun neraca keuangan	12 Kegiatan	Klarapedes	Rp. 36.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

8. TARINGGUL LANDEUH

1	Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbaiki Rumah tidak layak huni	Rumah milik warga miskin dengan kondisi sudah lama dan rentan resiko ketika musim angin dan hujan	20 Unit	Dusun I dan Dusun II	Rp. 437.500.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
2	Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran jalan PU dan Pembangunan Pondasi bahu jalan	sering terjadinya kecelakaan lalu lintas karena jalan terlalu sempit	100 m	Dusun I	Rp. 450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	banyak Masyarakat miskin tidak mempunyai jaminan kesehatan	500 orang	Dusun 1 dan Dusun 2	Rp. 200.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4	Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatnya Penanggulangan kemiskinan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Listrik Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga Miskin	40 Unit	Dusun 1 dan Dusun 2	Rp.	80.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, perbudaya dan pertaqwa	PUED	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	kurangnya keahlian/memahami pembukuan bumdes dalam menyusun neraca keuangan	12 Kegiatan	Kiarapedes	Rp.	36.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. MARGALUYU										
1	Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Musrenbang : Perbaikan Jalan Kabupaten	Kondisi Jalan Sudah Rusak dan mengkhawatirkan bagi para Pengguna Jalan	1 Kegiatan	Kp. Ciheulang RT.001 Rw.001 Dusun 1, Kab. Purwakarta	Rp.	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

RENJA KECK ARAPEDES TAHUN 2025

4	Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Listrik Desa	Meningkatkan Kesejahteraan Warga Miskin	40 Unit	Dusun 1 dan Dusun 2	Rp.	80.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudi daya dan bertanggung jawab	PUED	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	kurangnya keahlian/memahami pembukuan bumdes dalam menyusun neraca keuangan	12 Kegiatan	Kiarapedes	Rp.	36.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. MARGALUYU										
1	Prioritas Pembangunan 9 : Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka percepatan pengembangan wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Musrenbang : Perbaikan Jalan Kabupaten	Kondisi Jalan Sudah Rusak dan mengkhawatirkan bagi para Pengguna Jalan	1 Kegiatan	Kp. Cihulang RT.001 Rw.001 Dusun 1, Kab. Purwakarta	Rp.	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2	Pengembangan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Musrenbang : Pengembangan UMKM	Keterbatasannya Lowongan Pekerjaan Sehingga Perputaran Ekonomi di Masyarakat Belum Maksimal, Terdorong Dengan Potensi Yang Baik di Masyarakat Untuk Mengembangkan UMKM di Masyarakat	1 Kegiatan	Kp. Cisit Rt. 005 Rw. 003 Dusun 2, Kab. Purwakarta	Rp.	50.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
3	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat	meningkatnya kunjungan wisatawan	Pariwisata	Musrenbang : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Terbatasnya Infrastruktur, Potensi Alam Yang Sangat Baik	1 Kegiatan	Kp. Campakaisne Rt. 010 Rw. 005 Dusun 3	Rp.	900.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
4	Prioritas Pembangunan 7 : Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan	meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan	Pertanian	Musrenbang : Pembangunan Prasarana Pertanian	Keterbatasan Infrastruktur Jalan Produksi Pertanian Merupakan Salah Satu Kendala Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di	1 Kegiatan	Kp. Ciheulang Rt. 012 Rw. 002 Dusun 1, Kab. Purwakarta	Rp.	500.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian

		wilayah			Masyarakat					
5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, perbudaya dan bertaqwa	PUED	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar Desa	kurangnya keahlian/memahami pembukuan bumdes dalam menyusun neraca keuangan	12 Kegiatan	Klarapedes	Rp.	36.000.000	Dinas Penerimaan Masyarakat dan Desa
10. MEKARAJA										
1	Prioritas Pembangunan 7 : Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pembangunan Jalan	Pertanian	Pembangunan Jalan Produksi/Usaha Tani	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	L : 2M P 500M	Kp. Ciseureuh RT 10/35 Dusun III	Rp.	125.000.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian

2	Prodi Tas Pembangunan 3 Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Jalan di Semua Kilawati	Peningkatan Fasilitas Umum	Peningkatan dan Peningkatan	Pembangunan Jalan Masyarakat Dusun	Program : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Lingkungan (PSL)	1 Unit	Kp. Campaka RT 03/03 Dusun I	Rp	60.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Prodi Tas Pembangunan 7 Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pembangunan Jalan	Pertanian	Pembangunan Jalan Produksi Usaha Tani	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2500 M	Kp. Bahakan Jengki - Kp. Cikembuh Dusun II	Rp	300.000.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Prodi Tas Pembangunan 2 Peningkatan Qualitas SGM dan Pemajuan Kecerdasan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Kegiatan Bimbingan/Pelatihan Kerja	Program : Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Paket	Desa Mekarjaya	Rp	15.000.000,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
5	Peningkatan SDM dan Pemajuan Kecerdasan	Meningkatkan Qualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan	PUBD	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Kurangnya keahlian/memahami pembinaan BUMDes dalam menyusun pelaksanaan keuangan	12 kegiatan	Kiarapodes	Rp	36.000.000	Dinas Perencanaan Masyarakat dan Desa

RENTAN BOK, Kiarapodes Tahun 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KIARAPEDES

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024- 2026 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2026.

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2025 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2024-2029 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2024 – 2029 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Empat Pilar RPJMN IV tahun 2024 – 2029 :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Visi Pemerintah Pusat yaitu :

"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG"

9 Misi Pemerintah Pusat yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa, dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

5. Arahan Presiden yakni :

1. **Pembangunan SDM**, yaitu Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. **Pembangunan Infrastruktur**, yaitu Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. **Penyederhanaan Regulasi**, yaitu Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. **Penyederhanaan Birokrasi**, yaitu Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. **Transformasi Ekonomi**, yaitu Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7. Agenda Pembangunan Nasional yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni :

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.**

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) pengentasan kemiskinan; dan
- g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) revolusi mental dalam sistem sosial.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c) pembangunan rendah karbon.

7. **Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik**

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

3.2 **TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN KIARAPEDES**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Penyusunan

Renja Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 mengacu kepada Visi dan Misi RENSTRA Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2026, dimana Visi Pembangunan Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta yaitu:

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Visi merupakan cara pandang kedepan, kearah mana Kecamatan Kiarapedes akan diarahkan dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif untuk mencapai tujuan, dalam mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kiarapedes.

Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta memiliki misi yaitu:

MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Guna mencapai visi dan misi tersebut diatas maka Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta menetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, sebagaimana table 3.1 berikut:

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kiarapedes Tahun 2025

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"			
MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Startegi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
3.		Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktivitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktivitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa pengampu sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa untuk menunjang tujuan dan sasaran tersebut diatas, Kecamatan Kiarapedes mengusulkan 6 (Enam) program dan 12 (Dua belas) kegiatan serta 32 (Tiga puluh dua) subkegiatan untuk dilaksanakan pada Tahun 2025. Program, kegiatan dan Subkegiatan tersebut adalah :

No.	Program	No.	Kegiatan (Rp.)		No.	Subkegiatan (Rp)	
1	2	3	4		5	6	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	30.000.000	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000
					2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
					3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.766.029.604	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.756.029.604
					5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	10.000.000

		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.30.2.1.12	8	Konsumsi Bahan SPPD	40.000.000
					9	Pemeliharaan Kumpulan Instalasi Listrik, Peningkatan Bangunan Kantor	30.000.000
					10	Pemeliharaan dan Peningkatan Kantor	104.30.2.1.12
					11	Pemeliharaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000
					12	Pemeliharaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000	13	Pengadaan Perbaikan Dan Mesin Lainnya	40.000.000
		5	Penyediaan Jasa Penujng Urusan Pemerintahan daerah	523.528.230	14	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000
					15	Penyediaan jasa komunikasi, sambungannya dan listrik	20.632.230
					16	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	202.896.000
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.000.000	17	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	50.000.000
					18	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.000.000
					19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.000.000
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100.000.000	20	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100.000.000
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.000.000	21	Subkegiatan Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Rimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35.000.000
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN	9	Fasilitasi, Rekomendasi dan	20.000.000	22	Fasilitasi Administrasi Tata	10.000.000

	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Pemerintahan Desa.	
					21	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10.000.000
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	35.000.000	22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di desa	20.000.000
						Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat Kesehatan keluarganya dengan menerapkan perilaku hidup sehat	15.000.000
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	23	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000

Tabel 1-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Indikatif	Dana/Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KECAMATAN KIARAPEDES					3,485,424,995	APBD		93 %		3,535,057,225
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kec Kiarapedes		3,447,424,995	APBD		93 %		
	1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	Kec.Kiarapedes	1 dokumen	47.000.000	APBD	1 dokumen		
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec.Kiarapedes	18 Orang/bulan	2,779,424,995	APBD	18 Orang/bulan		

	3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Kiarapedes	1 paket/laporan	183.000.000	APBD	100%	
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Kiarapedes		40.000.000	APBD	100%	
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kec.Kiarapedes	100%	308.000.000	APBD	100%	
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Kiarapedes	100%	90.000.000	APBD	100%	
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Kiarapedes	Baik	5.000.000	APBD	-	-
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Kiarapedes	100%	5.000.000	APBD		
III		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Kiarapedes					
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Kiarapedes	15 Orang	10.000.000	APBD		

IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec.Kiarapedes	100%	15.000.000	APBD		100%	
1	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec.Kiarapedes	1 kegiatan	15.000.000	APBD		1 Kegiatan	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec.Kiarapedes		15.000.000	APBD			
1	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Kec.Kiarapedes	1 kegiatan	5.000.000	APBD		100%	
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kec.Kiarapedes	1 Kegiatan	5.000.000	APBD			
1	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec.Kiarapedes	1 kegiatan	5.000.000	APBD		1 Kegiatan	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KIARAPEDES

a. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kiarapedes Tahun 2025

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana kerja tahun 2025, Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Kiarapedes tahun 2025 - 2026.

Rencana Kerja Pagu Indikatif tahun 2025 sebesar Rp 3,475,424,995-, yang terdiri dari Rp. 2,759,424,995,- untuk belanja Gaji dan Tunjangan ASN sedangkan Rp. 716.000.000.- untuk belanja Program dan Kegiatan, adapun rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kiarapedes Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1. Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah- sebesar Rp. 47.000.000,- dengan indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun, dengan target terealisasi 100 %;
2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah- sebesar Rp. 2.779.424.995,- dengan indikator : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun, dengan target terealisasi 90 %;
3. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah- sebesar Rp. 183.000.000,- dengan indikator Jumlah Pengelolaan Penyediaan Administrasi Umum yang disediakan, target terealisasi : 100 %;
4. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah- sebesar Rp. 40.000.000,- dengan indikator Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target terealisasi 100 %;
5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah- sebesar Rp. 308.000.000,- target terealisasi 100 %;
6. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah- sebesar Rp.90.000.000,- target terealisasi 100 %

Total Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 3,445,424,995,-

program : Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;

1. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- sebesar Rp. 5.000.000,- dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, target
terrealisasi 100 %;

Total II. Program : Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Rp. 5.000.000,-

program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala
Daerah, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 10.000.000,-

Total Rencana Keuangan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Publik Rp.
10.000.000,-

IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa, anggaran yang disediakan Rp. 15.000.000,- dengan indikator
Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa- target dapat terealisasi 100 %.

V. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan, dengan anggaran yang tersedia Rp. 5.000,- dengan indikator Jumlah
kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan yang dilaksanakan- target terealisasi 100 %.

VI. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
dengan anggaran Rp. 5.000.000,- dengan indikator Jumlah Kegiatan Upaya
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum-target terealisasi 100 %

TABEL.4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan							
7 01 01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec.Kiarapedes	8	3,475,424,995	APBD	
	Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	Kec.Kiarapedes	3	47.000.000	APBD	
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kec.Kiarapedes	1	10.000.000	APBD	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Kiarapedes	1	17.000.000	APBD	
		3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Kiarapedes	1	20.000.000	APBD	

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	Kec.Kiarapedes	4	2.779.424.995	APBD	
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Kiarapedes	18	2.759.424.995	APBD	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Kiarapedes	1	20.000.000	APBD	
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah				Jumlah Pengelolaan Penyediaan Administrasi Umum yang disediakan	Kec.Kiarapedes	1	183.000.000	APBD	
	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Kiarapedes	1	20.000.000	APBD	
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Kiarapedes	1	46.000.000	APBD	
	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Kiarapedes	1	75.000.000	APBD	
	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Kiarapedes	1	20.000.000	APBD	
	10	Penyelenggaraan rapat dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Kiarapedes	1	20.000.000	APBD	
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah				Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Kiarapedes		40.000.000	APBD	

					11	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec.Kiarapedes		40.00.0000	APBD	
					Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Kiarapedes		308.000.000		
					12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Kiarapedes		35.000.000	APBD	
					13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Kiarapedes		18.000.000	APBD	
					14	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Kiarapedes		255.000.000	APBD	
					Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Kiarapedes		90.000.000		
					15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Kiarapedes		30.000.000		

				16	Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10.000.000	APBD	
				17	Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			50.000.000	APBD	
				Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec.Kiarapedes		5.000.000	APBD	
				Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan	Kec.Kiarapedes		5.000.000	APBD	
				18	Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Kiarapedes		5.000.000	APBD	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kec.Kiarapedes		10.000.000	APBD	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		1 Kegiatan	10.000.000	APBD	
				19	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec.Kiarapedes	15 Orang	10.000.000	APBD	
				Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan	Kec.Kiarapedes		15.000.000		

RENJA KEC.KIARAPEDES TAHUN 2025

				Kegiatan :Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Kiarapedes		15.000.000		
			20	Subkegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Kiarapedes		5.000.000	APBD	
			21	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec.Kiarapedes		10.000.000	APBD	
				Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Kec.Kiarapedes		5.000.000	APBD	
				Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat yang Dilaksanakan	Kec.Kiarapedes		5.000.000	APBD	
			22	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec.Kiarapedes	40 Orang	5.000.000	APBD	
				Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Kec.Kiarapedes		5.000.000	APBD	
				Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Laporan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Disusun	Kec.Kiarapedes		5.000.000	APBD	

RENJA KEC.KIARAPEDES TAHUN 2025

TABEL.4.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Arah kebijakan dan Pagu Indikatif
Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2026

KODE	VISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJPD 2005-2025	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			PERANGKAT DAERAH
									2025	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL												
Visi : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKU KARIMAH"												
Misi : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat												
7.01.01			Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,445,424,995	3,494,057,225	3,556,555,220	Kecamatan Kiarapedes
7.01.02								Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.000.000	6.000.000	6.000.000	Kecamatan Kiarapedes
01.03								Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000	10.000.000	14.000.000	Kecamatan Kiarapedes
01.04								Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kecamatan Kiarapedes
01.05								Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kecamatan Kiarapedes

RENJA KEC.KIARAPEDES TAHUN 2025

7.01.06								Program : Koordinasi Ketentraman Dan Keterlibatan Umum	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kecamatan Kiarapedes
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	----------------------

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2026. Penyusunan RENJA kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini diselaraskan dengan kebijakan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan harmonis serta berkelanjutan sesuai dengan dokumen perencanaan diatasnya.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025, mengusung Tema Pembangunan yakni "MENINGKATKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH", dengan Prioritas Pembangunan Daerah yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Dokumen RENJA Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Kecamatan Kiarapedes dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu masing-masing, yang dijabarkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun perencanaan. Oleh karena itu guna menjamin pelaksanaan RENJA Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJA sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) mengacu kepada Renstra Kecamatan Kiarapedes;
2. RENJA menjadi pedoman bagi Kantor Kecamatan Kiarapedes dalam menyusun dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Subgiatan Tahun 2025;
3. Perangkat Kecamatan Kiarapedes berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan yang terdapat dalam RENJA dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta masyarakat dan stakeholder Kecamatan Kiarapedes ;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA secara berkala terhadap capaian kinerja Kecamatan ;

5. RENJA menjadi acuan dalam penyusunan laporan capaian kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan di Kecamatan Kiarapedes seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Camat kepada Bupati, Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan, dan ~~perencanaan pembangunan~~ perencanaan pembangunan pembangunan daerah Kecamatan Kiarapedes dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sangat tergantung kepada peran serta dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar senantiasa bahu membahu dan terus bersinergi meningkatkan soliditas, harmonitas dan integritas dalam upaya membangun Kecamatan Kabupaten Purwakarta sehingga pelaksanaan pembangunan Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran demi mewujudkan Masyarakat Purwakarta yang Mandiri dan Sejahtera.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kiarapedes ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta dapat memenuhi harapan dan aspirasi semua pihak.

